

## BAB IV

### TRANSFORMASI MENUJU INTERNASIONALISASI KONFLIK PAPUA

Kurang lebih setengah abad lamanya konflik Papua tidak menemukan langkah-langkah perdamaian. Permasalahan yang dihadapi memiliki persoalan yang kompleks. Konflik Papua memiliki satu hal unik, yang membedakannya dengan konflik-konflik lokal lain di Indonesia. Keunikan ini adalah adanya nasionalisme Papua yang telah tertanam di dalam diri rakyat Papua selama puluhan tahun. Rasa nasionalisme tersebutlah yang mendorong rakyat Papua membenci adanya penjajahan terhadap mereka, baik yang dilakukan Belanda maupun Indonesia.

Umumnya kekerasan di Papua terkait dengan konflik antar warga dengan suku, separatisme, dan kriminalitas. Proses dan hasil pembangunan di Papua selama otonomi khusus belum dirasakan sepenuhnya oleh orang asli Papua, terutama di wilayah pedalaman. Konflik di Papua bersumber pada perbedaan kepentingan antara masyarakat Papua dengan pemerintah Indonesia yang kurang memperhatikan tentang kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Pada awalnya tujuan gerakan masyarakat Papua adalah untuk memberi perhatian khusus terhadap pemerintah pusat kondisi ekonomi, sosial, dan budaya yang dirasakan rakyat Papua, namun pemerintah pusat merasa bahwa setelah diberikan otonomi khusus maka kepentingan mereka telah dipenuhi.

Konflik mulai mengalami eskalasi ketika gerakan Operasi Papua Merdeka (OPM) menyebarkan isu separatism dari NKRI. Perwujudan dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora pada saat ulang tahun Gerakan OPM. Pada pihak pemerintah menanggapi dengan tindakan represif oleh Militer Penindasan militer di tanah Papua meliputi beberapa bentuk, antara lain intimidasi, teror, penyiksaan, dan pembunuhan. Intimidasi, teror dan penyiksaan dilakukan berkenaan dengan pengambilalihan hak-hak adat masyarakat Papua atas SDA secara paksa untuk berbagai keperluan, seperti, transmigrasi, pertambangan, dan industri manufaktur maupun jasa wisata. Ketika penduduk asli berusaha mempertahankan hak-haknya atas SDA mereka diintimidasi dan diteror. Otonomi khusus sebagai kebijakan pemerintah dalam upaya menyelesaikan konflik kekerasan yang terjadi di Papua tersebut berjalan tidak efektif atau tidak berhasil hingga sekarang menyebabkan masalah ini belum sampai pada titik aman.

Kesimpulannya adalah bahwa kegiatan separatis, teror dan pembunuhan yang dijalankan oleh OPM hingga saat ini terbilang tidak efektif, kegagalan dalam menggunakan hard power dirasa perlu adanya perubahan strategi. OPM saat ini memasuki babak baru yang lebih mengedepankan penggunaan soft power atau diplomasi, yaitu dengan adanya Internasionalisasi kasus Papua dimana dengan mendirikan kantor perwakilan di Oxford pada 28 April 2013 yaitu sebagai media kampanye internasional untuk menarik simpatik dari masyarakat Internasional.

## A. Internasionalisasi Konflik Papua

Perhatian Internasional dalam menanggapi konflik Papua terkait masalah pelanggaran HAM cukup serius. Dukungan internasional kerap kali datang sebagai media dalam membantu menyelesaikan permasalahan konflik Papua. Khususnya Amerika, pada tanggal 20 Juli 2005, Amerika secara intensif mendukung kemerdekaan Papua Barat dalam US House of Representatives, yang mengagendakan agar DPR Amerika mengeluarkan rancangan *Foreign Relation Authorization Act (FRAA)* yang secara spesifik memuat referensi khusus mengenai Papua.

Bentuk dukungan parlemen Amerika terhadap konflik Papua menggambarkan bahwa adanya upaya campur tangan Amerika dalam penyelesaian gerakan separatis tersebut. Terdapat berbagai macam kemungkinan intervensi Amerika dalam menyelesaikan kasus Papua berujung pada Kemerdekaan Papua itu sendiri. Dan hal ini, sudah terbukti melalui MoU Helsinki untuk Aceh. Uni Eropa memang sejauh ini memang sudah menjadi pemain sentral di Aceh pasca MoU Helsinki. Misalnya saja Pieter Feith, Juha Christensen sementara dari persekutuan Inggris, Australia dan Amerika, mengandalkan pemain sentralnya pada Dr Damien Kingsbury dan Anthoni Zinni.<sup>28</sup>

Aktor-aktor tersebut merupakan utusan sebagai mediator antara pemerintah Indonesia dan gerakan separatis. Otomatis mereka sebagai penentu

---

<sup>28</sup> Hendrajit, 2013, *Papua Merdeka Amerika-Inggris-Australia-Belanda, Mata-Rantai Gerakan Internasionalisasi Untuk Papua Merdeka*, Diakses dari: [www.theglobalreview.com](http://www.theglobalreview.com), pada 6 Desember

jalannya hubungan Indonesia-Papua. Jika terdapat deadlock antara kedua belah pihak yang bersangkutan, para mediator terpaksa menjadi aktor utama dalam penyelesaian konflik ini. Secara tidak langsung, peran utama yang dimiliki dalam skenario Internasionalisasi Papua barat dapat berpotensi besar dalam memisahkan Papua dari NKRI. Apabila Papua terpisah dari NKRI, ini merupakan keuntungan Amerika dalam memanfaatkan sumber daya alam, dikarenakan adanya indikasi dukungan Amerika yang dengan mudah mempengaruhi Papua.

Di Australia, Bob Brown, politisi Partai Hijau Australia, juga mendukung gerakan pro Papua Merdeka, dengan mendesak pemerintahan Howard ketika itu untuk mendukung proses kemerdekaan Papua. Tentu saja usul gila-gilaan itu ditampik Howard, namun sebagai kompensasi, pemerintah Australia memberikan visa sementara kepada 42 pencari suaka asal Papua. Hubungan diplomatik Australia-RI jadi memanas, apalagi berkembang isu ketika itu bahwa ke-43 warga Papua yang mencari suaka ke Australia itu sebenarnya merupakan "agen-agen binaan" Australia yang memang akan ditarik mundur kembali ke Australia. Artinya, permintaan suaka itu hanya alasan saja agar mereka tidak lagi bertugas menjalankan operasi intelijen di Papua. Menurut Widodo, pemberian visa sementara kepada warga Papua oleh Australia, telah membenarkan adanya spekulasi adanya elemen-elemen di Australia yang membantu usaha kemerdekaan Papua.

Kehadiran Australia dalam mendukung kemerdekaan Papua Barat terlihat jelas dalam bidang pendanaan maupun perlengkapan atribut perang. Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang secara mengejutkan mengembangkan manuver

internasionalnya lewat *Free West Papua Campaign*, hal ini perlu dicermati secara intensif dan penuh kewaspadaan. Pada 28 April 2013 lalu, kantor perwakilan OPM di Oxford, Inggris secara resmi dibuka. Hal ini mengindikasikan semakin kuatnya arah internasionalisasi isu Papua tidak saja di Amerika Serikat, Australia melainkan juga di Inggris dan Belanda.

Proses internasionalisasi dapat ditandai dengan sebuah kegagalan dalam menyelesaikan sebuah konflik etnis/ lokal. Kegagalan dalam menyelesaikan konflik membuat pihak-pihak yang terkait dapat mengundang perhatian pihak internasional. Hadirnya peran internasional dalam menyelesaikan konflik pun akan muncul, menjadi pihak ketiga atau mediator, maupun berusaha untuk memperoleh keuntungan dalam menyikapi sebuah konflik.

Pada Internasionalisasi Konflik Papua dapat dipengaruhi oleh peran Negara. Negara masih merupakan kekuatan dominan dalam politik internasional dan negara merupakan salah satu aktor pendukung proses internasionalisasi konflik etnis. Keterlibatan negara sebagai pihak ketiga dalam konflik etnis di suatu negara bukanlah sebuah kenyataan baru. Sebuah negara yang terlibat dalam konflik etnis dapat berperan sebagai pihak pendamai maupun sebagai pihak yang memperkeruh konflik. Sekali pun banyak aktor-aktor non-negara memberi dukungan pada salah satu kelompok etnis yang bertikai, dukungan yang mereka berikan tidak melebihi skala dan jumlah dukungan yang diberikan oleh negara. Pada era Perang Dingin, dukungan negara membawa dampak besar pada efektivitas perjuangan kelompok etnis. Penelitian Byman menunjukkan bahwa negara merupakan sponsor penting pemeliharaan konflik etnis dengan

memberikan bantuan militer, politik dan kegiatan logistik, baik dalam skala terbatas maupun besar. Salah satu contohnya adalah Libya yang secara aktif membantu Gerakan Aceh Merdeka. Dukungan tersebut setidaknya terjadi sampai dengan tahun 1991. Terbatasnya jumlah personel dan logistik yang didapatkan GAM, menyebabkan organisasi ini tidak memiliki potensi berkembang untuk menjadi konflik internasional.<sup>29</sup>

Dalam hal ini, konflik Papua telah mengalami proses internasionalisasi yang begitu panjang, dimana keterpihkan internasional sebagai pihak ketiga berupaya membantu penyelesaian konflik. Keterlibatan PBB dalam membantu menyelesaikan konflik etnis ini dianggap sebagai sebuah momentum penting dalam upaya mencari keadilan. Kuatnya keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI menjadikan OPM berupaya dalam mencari keadilan dan pengakuan internasional. Mempengaruhi pihak asing dalam setiap isu-isu yang berupa kekerasan, HAM, maupun tidak adanya kemakmuran yang diberikan oleh Indonesia.

### **B. Faktor-Faktor Babak Baru Separatisme Papua**

Kegagalan dimasa lalu tidak membuat OPM menghentikan tujuannya memisahkan diri dari NKRI, *Hard Power* yang diterapkan OPM selama ini mengalami kegagalan yang menyebabkan OPM mencoba strategi baru. *Soft*

---

<sup>29</sup> Lihat Baiq Wardhani, (hal 16-17) Dari Lokal ke Internasional: Mengamati Gejala Internasionalisasi, Diakses Dari : [http://www.academia.edu/902464/Dari\\_Lokal\\_ke\\_Internasional](http://www.academia.edu/902464/Dari_Lokal_ke_Internasional), Diakses Pada tanggal 6 Desember

*Power* ialah salah satunya, berupaya lebih menekankan pada aspek diplomasi.

Bentuk strategi baru yang dihasilkan merupakan cerminan dari babak baru dalam perjalanan separatis Papua, yaitu mendirikan kantor perwakilan di Oxford-Inggris.

Adapun penyebab babak baru separatisme di Papua dipengaruhi oleh 2 faktor :

1. Faktor internal, artinya bahwa OPM menyimpulkan gerakan militernya tidak efektif. Perjalanan konflik separatis di Papua telah memasuki setengah abad lamanya. Ini merupakan perjalanan panjang dalam kisah separatis di Indonesia. Penembakan dan Kekerasan yang diluncurkan bertahun-tahun ialah hal yang sia-sia.

Kesalahan terbesar dalam konflik Papua itu sendiri ialah terletak pada pemahaman tentang sejarah. Sebagian besar keanggotaan OPM tidak memahami sejarah Papua. Minimnya dokumentasi tentang Papua merupakan hal mendasar dalam memahami realita tersebut. Seperti halnya Benny Wenda, tokoh yang mendirikan kantor OPM di Inggris menceritakan tentang pencarian kebenaran terhadap sejarah Papua Barat. Seperti yang dilansir pada situs resminya, bahwa :<sup>30</sup>

“Frustrated with the lack of information he was provided in school, and his mother’s refusal to answer his questions, he sought out information about Papuan history. He searched the school library, the public library, the university library. But he found nothing. ‘Why do we only study Indonesian history? The history of Java, Sumatra and Bali? Where is the history of Papua?’ he asked. During the 1980s, and even into the early 1990s, there was very little written history or discussion about the circumstances of Papua’s incorporation into Indonesia or the events that followed. Eventually, through story-telling, Benny came to learn how the

<sup>30</sup> Benny Wenda Story, *Searching for The Truth*, Diakses dari :  
<http://freewestpapua.org/info/benny-wendas-story/>, diakses Pada Tanggal 6 Desember

Dutch had retained control of the province after 1945 and promised independence. He found out about the declaration of Papuan sovereignty on 1 December 1961, about the West Papuan flag (the Bintang Kejora), the national anthem (Hai Tanahku Papua), the Indonesian invasion and the 1969 'Act of Free Choice' when a small group of hand-picked Papuans were intimidated into voting for integration with Indonesia."

Terjemahannya :

Benny Wenda merasa Frustrasi dengan kurangnya informasi yang diberikan di sekolah, dan penolakan ibunya untuk menjawab pertanyaan, ia mencari informasi tentang sejarah Papua. Dia mencari perpustakaan sekolah, perpustakaan umum, perpustakaan universitas. Tapi dia tidak menemukan apa pun. "Mengapa kita hanya mempelajari sejarah Indonesia? Sejarah Jawa, Sumatera dan Bali? Dimana sejarah Papua? "Tanyanya . Selama tahun 1980-an, dan bahkan pada awal 1990-an, minimnya sejarah atau diskusi tentang keadaan penggabungan Papua ke Indonesia atau peristiwa yang diikuti. Akhirnya, melalui bercerita, Benny datang untuk belajar bagaimana Belanda telah mempertahankan kontrol terhadap provinsi setelah tahun 1945 dan dijanjikannya kemerdekaan. Dia mengetahui tentang deklarasi kedaulatan Papua pada tanggal 1 Desember 1961, tentang bendera Papua Barat ( Bintang Kejora ), lagu kebangsaan ( Hai Tanahku Papua ), invasi Indonesia dan tahun 1969 ' Act of Free Choice ' ketika sekelompok kecil tangan perwakilan Papua diintimidasi dalam pemungutan suara untuk integrasi dengan Indonesia.

Ketidakhahaman tentang realita memang menjadi momok penting dalam penyelesaian sebuah konflik. Jika saja OPM sejak dahulu memahami sejarah integrasi Papua pada wilayah Indonesia, maka hal-hal yang bersifat kekerasan dapat diminimalisir dengan penggunaan dialog maupun kompromi. Telah terbukti, Benny Wenda dapat merubah permasalahan kekerasan OPM dengan penyelesaian melalui jalur diplomasi. Tidak dapat diprediksi, apakah babak baru OPM dalam internasionalisasi konflik Papua dapat berjalan sesuai yang diharapkan, ataupun kegagalan yang sama akan terulang untuk kedua kalinya.

Maka langkah internasionalisasi konflik Papua merupakan hal yang penting bagi OPM dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua, salah satunya dengan



melibatkan PBB dalam resolusi konflik Papua. OPM merasa adanya manipulasi pada perjanjian New York Agreement pada tahun 15 Agustus 1962, terutama pada kebebasan memilih (act of free choice) terhadap 1.026 rakyat Papua terdapat manipulasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia.

Dalam situs resminya, freewestpapua.org, OPM menyampaikan persoalan mengenai intervensi asing maupun kecurangan yang dilakukan Pemerintah Indonesia, antara lain :<sup>31</sup>

*The US intervened and engineered an agreement between Indonesia and the Netherlands, which in 1962 gave control of West Papua to the United Nations and one year later transferred control to Indonesia. The Papuans were never consulted. However, the agreement did promise them their right to self determination – a right which is guaranteed by the UN to all people in the world.*

Terjemahan :

Amerika Serikat campur tangan dan rekayasa perjanjian antara Indonesia dan Belanda, yang pada tahun 1962 memberikan kontrol Papua Barat kepada PBB dan satu tahun kemudian menyerahkan kendali ke Indonesia. Orang Papua tidak pernah dikonsultasikan. Namun, perjanjian tersebut tidak menjanjikan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri - hak yang dijamin oleh PBB untuk semua orang di dunia.

Pernyataan diatas merupakan ungkapan kekecewaan terhadap hasil perjanjian antara Indonesia-Belanda. Perjanjian yang dianggap tidak adanya jaminan terhadap rakyat Papua, terutama hal dalam kebebasan memilih dalam menentukan nasib sendiri

#### *Protests at Act of Free Choice*

*West Papuans holding placards, calling for UN assistance, after Indonesia's invasion of West Papua in 1962.*

---

<sup>31</sup> Free West Papua Campaign, *History Of West Papua*, diakses dari <http://freewestpapua.org/info/history-of-west-papua/>, pada tanggal 23 desember

*But the Act was a sham. Instead of overseeing a free and fair election, the UN stood by while Indonesia rigged the vote. Declaring that the Papuans were too 'primitive' to cope with democracy, the Indonesian military hand-picked just 1,026 'representative' Papuans, out of a population of one million, bribed them and threatened to kill them and their families if they voted the wrong way. So strong was the intimidation that despite widespread opposition to Indonesian rule, all 1,026 voted to remain a part of Indonesia.*

Terjemhan :

Papua memegang plakat, menyerukan assistance PBB, setelah invasi Indonesia ke Papua Barat pada tahun 1962.

Tapi UU itu palsu. Alih-alih mengawasi pemilihan umum yang bebas dan adil, PBB berdiri sementara Indonesia memberikan kecurangan suara. Menyatakan bahwa orang Papua terlalu 'primitif' untuk mengatasi demokrasi, militer Indonesia mengangkat tangan hanya 1.026 'perwakilan' Papua, dari populasi satu juta, menyuap mereka dan mengancam akan membunuh mereka dan keluarga mereka jika mereka memilih yang salah cara. Jadi kuat adalah intimidasi bahwa meskipun oposisi luas untuk pemerintahan Indonesia, semua 1.026 memilih untuk tetap menjadi bagian dari Indonesia .

New York Agreement merupakan faktor mendasar dalam upaya internasionalisasi Konflik Papua, dimana berusaha untuk memperoleh dukungan Internasional dalam memperoleh pengakuan dari masyarakat Internasional terhadap PPB dalam meninjau ulang kebebasan memilih nasib sendiri (self determination)

*One of the aims of the Free West Papua Campaign is to persuade the UN to review its role in this event and allow the Papuans a true act of self determination.*

Terjemahannya :

Salah satu tujuan dari Kampanye Papua Merdeka Barat untuk membujuk PBB untuk meninjau perannya dalam acara ini dan memungkinkan orang Papua tindakan sejati penentuan nasib sendiri.

2. Faktor eksternal, yaitu bentuk proses pembelajaran OPM sehingga menjalankan kampanye Internasional dan adanya komitmen internasional terhadap konflik Papua.

Tentunya OPM sebagai gerakan separatis mengadopsi cara-cara gerakan separatisme yang ada di Indonesia, khususnya Timor Timur. Pada situs resminya tentang pembentukan International Parliament for West Papua (IPWP) telah disebutkan bahwa : "Some of the founding members of IPWP, were involved in a similar group that was set up for East Timor prior to it gaining independence from Indonesia."<sup>32</sup>

Artinya ialah bahwa "Beberapa anggota pendiri IPWP, terlibat dalam kelompok serupa yang didirikan untuk Timor Timur yang sebelum itu memperoleh kemerdekaan dari Indonesia.

Jika ditelaah, maka keterlibatan OPM dalam lingkup Internasional merupakan pelajaran dari gerakan separatis yang sebelumnya telah Merdeka. Aktor pendukung gerakan separatis pun sama, yaitu hasil pembentukan dari Timor-Timur yang digunakan dalam membantu perjuangan kemerdekaan Papua Barat.

Mengenai kampanye Internasional, komunikasi Politik yang dijalankan OPM terbilang sangat efektif dalam membentuk komitmen Internasional. Dimana Benny Wenda yang suatu waktu pernah berkampanye bertemu dengan anggota

---

<sup>32</sup> Office Of Benny Wenda, 2008, *International Parliamentarians for West Papua, Founding member*, Dakses dari : <http://bennywenda.org/international-parliamentarians-for-west-papua/> diakses pada tanggal 6 Desember

US Congressman for American Samoa, Eni Faleomavaega in Washington D.C. Terlihat OPM mendapat dukungan Penuh dalam Support Of West Papua New Guinea's Quest For Freedom pada US House of Representatives.

DPR Amerika, Mr Eni Faleomavaega dalam US House of Representatives menyampaikan hal-hal yang mendukung Papua Barat dalam rancangan FRAA, In Support Of West Papua New Guinea's Quest For Freedom, yaitu .<sup>33</sup>

1. Honorable Prime Minister of Australia, Mr. John Howard, is visiting us here in Washington. It is my sincere hope that the Prime Minister will seriously rethink again Australia's policy towards West Papua New Guinea, and I urge all Pacific nations of the Forum Organization not to turn their backs on West Papua New Guinea.
2. The Forum nations should seriously take the matter of West Papua New Guinea before the United Nations for reexamination, especially on the faulty policies that were implemented by the United Nations towards West Papua New Guinea in the years past.
3. According to human rights reports and West Papuans themselves, actually approximately 300,000 to 400,000 West Papuans have been murdered, tortured to death, and disappeared at the hands of the Indonesian military.

Terjemahannya :

1. Perdana Menteri terhormat Australia, Mr. John Howard, yang mengunjungi kami di sini di Washington. Ini adalah harapan saya yang tulus bahwa Perdana Menteri serius akan memikirkan kembali lagi kebijakan Australia terhadap Papua Irian Barat, dan saya mendesak semua negara Pasifik Organisasi Forum untuk tidak berpaling dari Papua Irian Barat.

---

<sup>33</sup> The Library Of Congress, *In Support of West Papua New Guinea's Quest for Freedom*, (House of Representatives - July 20, 2005), diakses dari : <http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?r109:H20JY5-0075>., Pada tanggal 6 Desember

2. Forum harus serius menghadapi persoalan Papua Irian Barat sebelum PBB untuk pemeriksaan ulang, terutama pada kebijakan yang salah yang dilakukan oleh PBB terhadap Papua Irian Barat di tahun-tahun sebelumnya.
3. Menurut laporan hak asasi manusia dan Papua Barat sendiri, sebenarnya sekitar 300.000 hingga 400.000 orang Papua Barat telah dibunuh, disiksa sampai mati, dan menghilang di tangan militer Indonesia.

Adapun hasil dari rancangan tersebut ialah :

H.R. 2601. Foreign Relations Authorization Act, Fiscal Years 2006 and 2007 (as at July 13, 2005), pages 326:11 - 332:23]

#### **SEC. 1015.\* DEVELOPMENTS IN AND POLICY TOWARD INDONESIA.**

Findings Relating to Papua- Congress finds the following:<sup>34</sup>

- 1) *Papua, a resource-rich province whose indigenous inhabitants are predominantly Melanesian, was formerly a colony of the Netherlands.*
- 2) *While Indonesia has claimed Papua as part of its territory since its independence in the late 1940s, Papua remained under Dutch administrative control until 1962.*
- 3) *On August 15, 1962, Indonesia and the Netherlands signed an agreement at the United Nations in New York (commonly referred to as the 'New York Agreement') which transferred administration of Papua first to a United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), and then to Indonesia in 1963, pending an 'act of free choice . . . to permit the inhabitants to decide whether they wish to remain with Indonesia'.*
- 4) *In the New York Agreement, Indonesia formally recognized 'the eligibility of all adults [in Papua] . . . to participate in [an] act of self-determination to be carried out in accordance with international practice', and pledged 'to give the people of the territory the opportunity to exercise freedom of choice . . . before the end of 1969'.*

---

<sup>34</sup> Foreign Relations Authorization Act, 2005, *Development in and Policy Toward Indonesia*, diakses dari: <http://www.papuaweb.org/vl/www/02/us-2005-hr2601>, diakses tanggal 23 desember

- 5) *In July and August 1969, Indonesia conducted an 'Act of Free Choice', in which 1,025 selected Papuan elders voted unanimously to join Indonesia, in circumstances that were subject to both overt and covert forms of manipulation.*
- 6) *In the intervening years, indigenous Papuans have suffered extensive human rights abuses, natural resource exploitation, environmental degradation, and commercial dominance by immigrant communities, and some individuals and groups estimate that more than 100,000 Papuans have been killed during Indonesian rule, primarily during the Sukarno and Suharto administrations.*
- 7) *While the United States supports the territorial integrity of Indonesia, Indonesia's historical reliance on force for the maintenance of control has been counterproductive, and long-standing abuses by security forces have galvanized independence sentiments among many Papuans.*
- 8) *While the Indonesian parliament passed a Special Autonomy Law for Papua in October 2001 that was intended to allocate greater revenue and decision making authority to the Papuan provincial government, the promise of special autonomy has not been effectively realized and has been undermined in its implementation, such as by conflicting legal directives further subdividing the province in apparent contravention of the law and without the consent of appropriate provincial authorities.*
- 9) *Rather than demilitarizing its approach, Indonesia has reportedly sent thousands of additional troops to Papua, and military operations in the central highlands since the fall of 2004 have displaced thousands of civilians into very vulnerable circumstances, contributing further to mistrust of the central government by many indigenous Papuans.*
- 10) *According to the 2004 Annual Country Report on Human Rights Practices of the Department of State, in Indonesia 'security force members murdered, tortured, raped, beat, and arbitrarily detained civilians and members of separatist movements' and 'police frequently and arbitrarily detained persons without warrants, charges, or court proceedings' in Papua.*

Terjemahannya :

Temuan berkaitan dengan Papua - Kongres menemukan hal-hal berikut :

- 1) Papua, sebuah provinsi yang kaya sumber daya yang penduduknya sebagian besar adalah penduduk asli Melanesia, sebelumnya merupakan koloni Belanda.
- 2) Meskipun Indonesia telah mengklaim Papua sebagai bagian dari wilayahnya sejak kemerdekaannya di akhir 1940-an, Papua tetap berada di bawah kontrol administratif Belanda sampai tahun 1962.
- 3) Pada tanggal 15 Agustus 1962, Indonesia dan Belanda menandatangani kesepakatan di PBB di New York ( sering disebut sebagai ' New York Agreement ' ) yang ditransfer administrasi Papua pertama ke United Nations



Temporary Executive Authority ( UNTEA ), dan kemudian ke Indonesia pada tahun 1963, sambil menunggu tindakan pilihan bebas untuk mengizinkan penduduk dalam memutuskan apakah mereka ingin tetap bersama Indonesia.

- 4) Dalam Perjanjian New York, Indonesia secara resmi mengakui kelayakan dari semua orang dewasa di Papua untuk berpartisipasi dalam tindakan penentuan nasib sendiri yang akan dilakukan sesuai dengan praktek internasional, dan berjanji untuk memberikan orang-orang dari wilayah kesempatan untuk melaksanakan kebebasan memilih, sebelum akhir tahun 1969.
- 5) Pada bulan Juli dan Agustus 1969, Indonesia melakukan ' Act of Free Choice ', di mana 1.025 tetua Papua yang dipilih dengan suara bulat untuk bergabung dengan Indonesia, dalam kenyataannya terdapat 2 persoalan dilakukan secara jelas dan adanya bentuk rahasia manipulasi.
- 6) Bertahun-tahun, penduduk asli Papua telah menderita pelanggaran hak asasi manusia, eksploitasi sumber daya alam, degradasi lingkungan, dan dominasi komersial komunitas imigran, dan beberapa individu dan kelompok memperkirakan bahwa lebih dari 100.000 orang Papua telah tewas selama pemerintahan Indonesia, terutama selama pemerintahan Soekarno dan Soeharto.
- 7) Sementara Amerika Serikat mendukung integritas wilayah Indonesia, ketergantungan sejarah Indonesia pada kekuatan untuk pemeliharaan kontrol telah kontraproduktif, dan pelanggaran oleh pasukan keamanan telah galvanis sentimen kemerdekaan di antara banyak orang Papua.
- 8) Sementara parlemen Indonesia mengesahkan Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Papua pada bulan Oktober 2001 yang dimaksudkan untuk mengalokasikan pendapatan dan pengambilan keputusan kewenangan kepada pemerintah provinsi Papua yang lebih besar, janji otonomi khusus belum efektif menyadari dan telah dirusak dalam Surat implementasi, misalnya dengan saling bertentangan arahan hukum lebih lanjut membagi provinsi bertentangan nyata dari hukum dan tanpa persetujuan dari pemerintah provinsi sesuai.
- 9) Dari pendekatan demilitarizing, Indonesia dilaporkan telah mengirimkan ribuan pasukan tambahan ke Papua, dan operasi militer di dataran tinggi tengah sejak musim gugur 2004, telah mengungsi ribuan warga sipil dalam keadaan yang sangat rentan, memberikan kontribusi lebih lanjut untuk ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat oleh banyak penduduk asli Papua.
- 10) Menurut Laporan Tahunan 2004, Negara pada Praktek Hak Asasi Manusia Departemen Luar Negeri di Indonesia anggota pasukan keamanan membunuh, menyiksa, memperkosa, memukuli, dan warga sipil dan anggota gerakan separatis ditahan sewenang-wenang dan polisi sering dan sewenang-wenang menahan orang-orang tanpa surat perintah, tuduhan, atau proses pengadilan di Papua.

Komitmen tersebut yang secara garis besar, menghimbau kepada Perdana Menteri Australia untuk serius akan memikirkan kembali lagi kebijakan Australia terhadap Papua Irian Barat, dan mendesak semua negara Organisasi Forum Pasifik untuk tidak berpaling dari Papua Irian Barat, kemudian Forum harus serius menghadapi persoalan Papua Irian Barat sebelum PBB untuk pemeriksaan ulang, terutama pada kebijakan yang salah yang dilakukan oleh PBB terhadap Papua Irian Barat di tahun-tahun sebelumnya. Menurut laporan hak asasi manusia dan Papua Barat sendiri, sebenarnya sekitar 300.000 hingga 400.000 orang Papua Barat telah dibunuh, disiksa sampai mati, dan menghilang di tangan militer Indonesia.

Erat kaitannya dengan kepentingan OPM dalam menentukan tempat dalam mendirikan kantor OPM di Inggris. Dalam setiap pemasaran politiknya OPM menggunakan sebuah produk yaitu isu-isu yang menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah memanfaatkan Papua sebagai sumber keuntungan yang dimana tidak terjaminnya kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat Papua. Otonomi khusus dianggap sebagai sebuah cara pemerintah Indonesia demi menguasai sumber daya alam Papua. Kekerasan dan pelanggaran HAM adalah bentuk kekejaman Pemerintah Indonesia dalam mengamankan wilayah Papua. Bentuk isu ini sebagai media kampanye OPM di berbagai Negara dunia. Pembukaan kantor perwakilan OPM di Inggris sendiri dapat menimbulkan dampak pandangan negatif dari masyarakat Internasional terhadap Indonesia. Sementara OPM sendiri dapat menarik simpati dari masyarakat di dunia. OPM dalam hal ini sedang berusaha mencari perhatian masyarakat internasional untuk



memperoleh tanggapan dan reaksi yang diinginkan agar tercapai segala macam tujuan dan cita-cita OPM.

### **C. Kantor Perwakilan Sebagai Media Kampanye**

Berdirinya kantor OPM di Oxford-Inggris merupakan awal dari kegiatan kampanye Internasional demi menarik perhatian simpatisan terhadap masalah yang di alami oleh konflik Papua. Dalam hal ini, OPM mampu mempengaruhi masyarakat Internasional melalui isu pelanggaran HAM.

Pelanggaran HAM merupakan isu yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Hal-hal demikian merupakan isu yang sangat tepat dalam mempengaruhi seseorang untuk ikut peduli dalam mencapai perdamaian. Adapun proses dalam mencapai sebuah dukungan yaitu melalui Political Marketing.

#### **1. Instrumen Marketing Politik OPM**

Political Marketing adalah strategi kampanye politik untuk membentuk serangkaian makna politis tertentu didalam pemikiran para pemilih atau simpatisan. Makna politis yang terbentuk akan mengarahkan bagaimana simpatisan berperilaku untuk mendukung. Pembentukan makna politis dalam instrumen political marketing merupakan strategi dalam mempengaruhi simpatisan untuk ikut dalam mendukung salah satu pihak.

Ada 9 elemen dalam Political Marketing dalam mempengaruhi makna politis, diantaranya :<sup>35</sup>

1. *Positioning*, tindakan untuk mancapkan citra tertentu kedalam benak para pemilih agar tawaran produk politik dari suatu kontestan yang memiliki posisi khas, yang jelas mencari jendela di dalam otak pemilih.
2. Policy berhubungan dengan "*program kerja*" yang ditawarkan para konstestan ketika terpilih kelak, menawarkan solusi terhadap permasalahan kebangsaan, memunculkan isu-isu yang dianggap penting dan dapat diterima oleh konstituen, program kerja yang dapat diterima, yang menarik, mudah terserap oleh para pemilih. Elemen
3. ketiga; *person* adalah kandidat legislatif atau eksekutif yang akan dipilih dalam pemilu, kualitas *person* dapat dilihat melalui tiga dimensi yaitu kualitas instrumental, dimensi simbiolis, dan fenotipe optis, ketiga dimensi ini dikelola agar atributable.
4. Elemen keempat; *Party* adalah produk politik partai, yang mempunyai identitas utama, aset reputasi, dan identitas estites, ketiga hal tersebut akan dipertimbangkan oleh para pemilih dalam menetapkan pilihannya.
5. Elemen kelima; *Presentation* adalah bagaimana membungkus dengan baik ketiga elemen diatas (produk, person, partai) ini disajikan dengan bungkus semenarik mungkin, presentasi sangat penting karena dapat mempengaruhi makna politis yang membentuk dalam pemikiran para pemilih. *Presentation* disajikan dengan medium presentasi secara umum dapat di kelompokkan menjadi objek fisik, orang dan event.
6. Elemen keenam; *push markekting* adalah penyampain produk politik secara langsung kepada para pemilih, produk politik disampaikan kepada pasar politik yang meliputi media massa dan influencer group sebagai pasar perantara, dan para pemilih sebagai pasar tujuan akhir.
7. Pass Marketing, dimana pemasaran produk politik melalui orang atau kelompok berpengaruh yang mampu mempengaruhi opini pemilih.
8. Elemen delapan; *pull marketing* adalah penyampaian produk politik yang dimanfaatkan atau disampaikan melalui media massa. Elemen kedelapan; *pass marketing* adalah penyampaian produk politik kepada kelompok yang berpengaruh (influencer group).
9. Elemen kesembilan dari marketing politik; *polling dan survai* adalah penting dijalankan dalam strategi marketing politik tujuannya adalah untuk melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, supaya kita tahu sampai dimana iklan kita di terima oleh para pemilih, apa yang harus disampaikan, dan apa yang harus diubah dan apa yang harus diteruskan. Polling, riset, survai tidak bisa di pungkiri sangat penting dalam proses marketing politik.

---

<sup>35</sup> Adman Nursal, *Political Marketing, Sembilan Elemen Political Marketing*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2004, hal 295-298

Pertama, positioning, OPM berhasil menanamkan citra buruk pemerintah Indonesia dalam menangani konflik Papua. Pendekatan militer sebagai tindakan represif Indonesia telah banyak menimbulkan korban yang berupa pelanggaran HAM. Maka tanpa disadari dengan sangat mudah OPM dapat membentuk makna politis tersebut. Kedua, policy, sudah pasti dukungan yang diberikan simpatisan kepada OPM tidak serta berjalan dengan tangan kosong. Papua merupakan ladang minyak dan tambang, tanpa disadari bahwa dukungan tersebut ialah bagian dari strategi simpatisan dalam berupaya memanfaatkan sektor alam Papua. Ketiga, person, yaitu Benny Wenda sebagai mantan ketua Demmak (Dewan Musyawarah Masyarakat Koteka) terbilang memiliki integritas dalam upaya mengkampanyekan isu HAM pada kalangan Internasional

Keempat, party, sangatlah jelas bahwa organisasi OPM memiliki ideologi yang kuat dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat. Ini merupakan pertimbangan yang cukup jelas dimana OPM bersungguh-sungguh berjuang dalam melepaskan diri dari wilayah NKRI. Datangnya dukungan juga terbilang dari usaha OPM tersebut dalam memperoleh keadilan, dukungan yang jelas terletak pada keikutsertaan dalam menyuarakan kemerdekaan OPM. Kelima, presentation, aktifnya Benny Wenda dalam menggalang dukungan Internasional, merupakan hal pokok dalam keseriusan mengatasi konflik Papua Barat. Keenam, push marketing, dimana Benny Wenda sebagai Aktor Internasionalisasi Konflik Papua sangat berperan aktif dalam Free West Papua Campaign, terbukti dengan bertemunya Benny dengan DPR Amerika, Mr Faleomavaega dan David Cameroon pada November 2007.

Ketujuh, *Pass Marketing*, terpilihnya Benny Wenda merupakan cerminan dan harapan OPM dalam memperoleh dukungan dalam lingkup Internasional. *Delapan*, *pull marketing*, merupakan media penting sebagai bentuk keberlanjutan dalam kampanye, dalam hal ini OPM memiliki website resmi yang memuat dukungan maupun kontribusi pendanaan untuk gerakan OPM. Sembilan, *polling* dan *survei*, merupakan indikator tentang bahan evaluasi demi memperbaiki kualitas dalam proses kampanye. Secara garis besar, OPM telah memenuhi kesembilan elemen dalam *political marketing* tersebut. Kesuksesan OPM dalam berkampanye ialah bukan sebuah jaminan bahwa OPM akan berhasil dalam menggalang dukungan Internasional.

Instrumen Marketing OPM sangat menarik untuk dicermati, perjalanan panjang Benny Wenda dalam berkampanye yaitu bernula tak lama setelah diberikan suaka politik di Inggris, Benny mulai berkampanye untuk penentuan nasib sendiri dari umat-Nya pada berbagai bidang. Dia mendirikan kelompok Kampanye Papua Merdeka Barat pada tahun 2004. Berbasis di Oxford, kampanye bekerja untuk menyebarkan kesadaran pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat dan menyoroti hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat. Pada kampanye politik, Benny telah bertemu dengan sejumlah politisi termasuk Perdana Menteri Inggris, dan Presiden Senegal saat berkunjung ke Afrika Barat pada tahun 2010. Sebagai tanda dukungan untuk karyanya, Walikota Oxford juga mendukung Papua Barat dalam mengibarkan bendera Bintang Kejora di atas Balai Kota Oxford pada tanggal 1 Desember setiap tahunnya.

Perjalanan Benny Wenda tanpa lelah di seluruh Inggris dan Eropa, memberikan pidato di berbagai universitas, kelompok aksi lokal dan festival, meningkatkan kesadaran tentang penderitaan rakyat Papua. Pada tahun 2010 Benny perjalanan ke Dakar, Senegal atas undangan Presiden Abdoulaye Wade, untuk menghadiri Festival Dunia Hitam Seni dan Budaya. Benny menyampaikan pidato menginformasikan peserta tentang perjuangan terlupakan Papua Barat. Setelah pidatonya Presiden meminta semua yang hadir untuk memberikan dukungan mereka kepada orang-orang Papua.

Pada tahun 2012 Benny melakukan perjalanan ke Norwegia, Belanda dan Swedia. Dia sebagai pembicara tamu di Oslo Freedom Forum di mana ia menerima tepuk tangan berdiri untuk pidato tentang perjuangan rakyatnya untuk mengatasi kekuasaan kolonial Indonesia. Pada bulan November dan Desember 2012, Benny melakukan tur Karibia dan Amerika Selatan, melobi politisi dan pertemuan dengan gerakan aktivis untuk mendukung mereka dengan situasi di Papua Barat. Kemudian membawanya ke negara termasuk Barbados, Jamaika dan Guyana. Dia juga co - host acara peluncuran International Parliamentarians for West Papua ( IPWP ) di Georgetown, ibu kota Guyana.

Benny bertemu mantan Presiden Dewan Keamanan PBB dan Menteri Luar Negeri Guyana, Rashleigh Jackson. ( Georgetown, Guyana, Desember 2012 ). membahas panjang lebar situasi di Papua Barat dan hak rakyat Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri. Dia juga bertemu dengan Rashleigh Jackson, mantan Presiden Dewan Keamanan PBB dan mantan Menteri Luar Negeri Guyana. Setelah pertemuan mereka Mr. Jackson menjanjikan dukungannya dan

menyatakan ini adalah waktu untuk membawa akhir yang sukses perjuangan gigih dan berani rakyat [ Papua Barat ] untuk Kebebasan dan Kemerdekaan.

Kampanye Benny Wenda berjalan sangat efektif, dukungan dari kepala negara membuktikan bahwa "*presentation*" dalam marketing berjalan dengan baik. Merangkai isu-isu dalam mempengaruhi makna politis kepada para pendukung. Pidato merupakan hal yang sangat berpengaruh, ditambah dengan merangkum isu-isu, terutama isu HAM. Dalam berbagai kampanye Benny Wenda, kekerasan, penyiksaan, dan pembunuhan merupakan satu paket isu-isu yang mampu mempengaruhi aktivis maupun kepala negara di dunia.

Efektifitas kantor perwakilan OPM di Oxford, dibuktikan dengan pembukaan cabang baru kantor OPM pada 15 Agustus 2013, kantor baru di The Hague, Belanda.. Puluhan orang menghadiri pembukaan kantor ini, mendukung menuju penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan Papua Barat. Kantor tersebut bertujuan untuk menginformasikan masyarakat internasional sehingga semua akan dapat memahami mengapa orang-orang Papua Barat dijajah.

OPM dapat mempengaruhi pihak Belanda dalam mendukung kampanye kebebasan internasional Papua Barat dimulai tepat 51 tahun yang lalu di Den Haag saat pemerintah Belanda menandatangani apa yang disebut " New York Agreement " di bawah tekanan dari Amerika Serikat dan Indonesia dan oleh karena itu bangsa Papua Barat merasa secara ilegal diduduki oleh Indonesia.

Pada pembukaan kantor di Belanda, Benny Wenda , pendiri Kampanye Papua Merdeka Barat memberikan pidato yang dapat mempengaruhi makna

politisnya, yaitu kata Genosida. *Political Marketing* terletak pada pola mempengaruhi pemilih atau pendukung. Kata genosida yang digunakan Benny Wenda terbilang sangat mempengaruhi masyarakat Internasional. Secara tidak langsung bahwa, OPM membentuk makna politis yang tertuju pada pemerintah Indonesia. Kata Genosida mengacu pada pemerintah Indonesia yang ingin membantai Masyarakat Papua secara keseluruhan. Hal ini membuktikan bahwa dukungan yang diperoleh oleh OPM semakin meningkat. Bentuk dukungan masyarakat internasional terhadap rakyat Papua melalui berbagai macam cara, yaitu : pendanaan, advokasi, dan juga pembelian atribut kampanye Free West Papua Campaign berupa materai, leaflet, dan poster yang berhubungan dengan Papua Merdeka. Keberhasilan Benny Wenda dalam mengubah pandangan masyarakat Internasional telah terbukti dimana pada tanggal 8 oktober 2013 telah dinominasikan untuk Hadiah Nobel Perdamaian 2013.

Benny Wenda dan tahanan politik Papua Barat Filep Karma telah berhasil dinominasikan untuk penghargaan terkenal di dunia untuk pekerjaan yang dilakukan selama hidup mereka dalam berjuang untuk perdamaian, kebebasan dan keadilan bagi bangsa mereka dari Papua Barat. Hadiah penghargaan Nobel Perdamaian adalah salah satu penghargaan paling terkenal di dunia dan diberikan oleh Komite Nobel kepada mereka yang telah melakukan sebagian besar atau karya terbaik untuk persaudaraan antara bangsa-bangsa, penghapusan atau pengurangan tentara berdiri dan untuk memegang dan promosi kongres perdamaian. Sebelumnya Nobel Perdamaian diberikan kepada Uskup Agung Desmond Tutu, Jose Ramos Horta, Nelson Mandela dan Aung San Suu Kyi.

Apresiasi yang diberikan kepada Benny Wenda merupakan hasil kerja keras berupa kampanye dan promosi terhadap apa yang telah terjadi di Papua. Keberhasilan dalam menggalang dukungan sebagai bentuk adanya pengaruh masyarakat Internasional untuk turut prihatin terhadap kondisi Papua.

## **2. Dukungan Internasional**

Dukungan Internasional yang diberikan kepada OPM semakin meningkat, yaitu berawal dari keberhasilan Benny Wenda membentuk International Parliamentarians for West Papua dan International Lawyer's for West Papua.

### **A. International Parliamentarians for West Papua (IPWP)**

Parlemen Internasional untuk Papua Barat ( IPWP ) lahir pada tanggal 15 oktober 2008 adalah kelompok lintas partai politisi dari seluruh dunia, mendukung penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat.

Didirikan oleh pemimpin kemerdekaan Papua Barat Benny Wenda, dan diketuai oleh politisi Inggris Andrew Smith dan Lord Harries, tujuan IPWP adalah untuk mengembangkan dukungan parlemen internasional dan kesadaran untuk gerakan perlawanan sipil Papua Barat, ilegalitas 1969 Undang-Undang of Free Choice, dan untuk menyoroti dicabut hak rakyat Papua Barat untuk menentukan masa depan mereka sendiri melalui referendum yang bebas dan adil. IPWP mengambil model kelompok serupa yang membantu memimpin gerakan



kemerdekaan yaitu Timor Timur. Adapun Deklarasi Papua Barat, yang ditandatangani oleh lebih dari 80 anggota parlemen berbunyi:<sup>36</sup>

" We the undersigned recognise the inalienable right of the indigenous people of West Papua to self-determination, which was violated in the 1969 "Act of Free Choice", and call upon our governments through the United Nations to put in place arrangements for the free exercise of that right so that the indigenous people of West Papua can decide democratically their own future in accordance with international.

Terjemahannya :

Kami yang bertanda tangan mengakui hak mutlak rakyat pribumi Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri, yang dilanggar di tahun 1969 "Act of Free Choice", dan menyerukan kepada pemerintah kita melalui PBB untuk dimasukkan ke dalam pengaturan tempat untuk latihan bebas hak tersebut sehingga penduduk asli Papua Barat dapat memutuskan secara demokratis masa depan mereka sendiri sesuai dengan internasional.

Sangat jelas terlihat OPM menekankan konflik Pada konteks hukum Internasional. Hal ini dikarenakan merupakan cara satu-satunya dalam memperoleh kemerdekaan, yaitu dalam terlibatnya dukungan Internasional. Adapun harapan terbentuknya IPWP ialah sebagai wadah untuk mendukung perjuangan Papua Merdeka adapun dalam situs resminya yang berbunyi :

"At the launch of IPWP in London, other areas that were discussed were ways of developing support amongst politicians from other countries, the possibility of sending a United Nations peacekeeping force to West Papua, and sending a delegation to West Papua on a fact finding mission."<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Benny Wenda, op.cit

<sup>37</sup> Ibid

Terjemahannya :

"Pada peluncuran IPWP di London, daerah lain yang dibahas adalah cara-cara mengembangkan dukungan di antara politisi dari negara lain, kemungkinan pengiriman pasukan penjaga perdamaian PBB untuk Papua Barat, dan mengirim delegasi ke Papua Barat pada misi pencari fakta.

Selain itu, IPWP tidak berjalan sendiri namun adanya dukungan pihak asing dalam membantu perjalanan panjang perjuangan Papua Merdeka, Parlemen Internasional untuk Papua Barat sejauh ini telah mendaftarkan dukungan dari politisi dari negara-negara diantaranya : Inggris, Amerika Serikat, Selandia Baru, Australia, Vanuatu, Republik Ceko, Swiss, Guyana, Belanda, Swedia, dan Papua Nugini.

## **B. International Lawyers for West Papua**

### **1. Sejarah International Lawyers for West Papua (ILWP)**

Perjalanan panjang perjuangan Kemerdekaan Papua, Organisasi Papua Merdeka membentuk pengacara Internasional untuk Papua Barat (ILWP). Tujuan ILWP seperti yang terlampir pada situs resmi Benny Wenda adalah untuk membantu masyarakat adat Papua Barat untuk menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri di bawah hukum internasional. Pada tanggal 5 April 2009, ILWP diluncurkan di Guyana, Amerika Selatan.<sup>38</sup>

“ The ILWP’s mission is to help the indigenous peoples of West Papua to exercise their right to self-determination under international law.”

---

<sup>38</sup> Office Of Benny Wenda, 2008, International Lawyers for West Papua, Diakses dari : <http://bennywenda.org/international-lawyers-for-west-papua/>

### Statement of Legal Principles on West Papua<sup>39</sup>

- We the undersigned recognise and confirm that the indigenous peoples of West Papua have a fundamental right to self-determination under international law.
- We are committed to assisting the indigenous peoples of West Papua to exercise freely and peacefully their right to self-determination.
- We are also committed to upholding, strengthening and preserving the fundamental rights and freedoms of the indigenous peoples of West Papua under international law.
- We call upon the international community of States and the United Nations to uphold the international rule of law.
- We request indigenous peoples across the world to help the indigenous Papuan peoples to exercise peacefully their human rights.

Terjemahannya kurang lebih seperti ini :

#### Pernyataan Prinsip Hukum di Papua Barat

- Kami yang bertanda tangan mengakui dan mengkonfirmasi bahwa masyarakat adat Papua Barat memiliki hak mendasar untuk penentuan nasib sendiri di bawah hukum internasional.
- Kami berkomitmen untuk membantu masyarakat adat Papua Barat untuk melaksanakan secara bebas dan damai hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.
- Kami juga berkomitmen untuk menjunjung tinggi, memperkuat dan menjaga hak-hak dasar dan kebebasan dari masyarakat adat Papua Barat di bawah hukum internasional.
- Kami menyerukan kepada komunitas internasional dan PBB untuk menegakkan aturan hukum internasional.
- Kami meminta masyarakat adat di seluruh dunia untuk membantu penduduk asli Papua untuk melaksanakan damai hak asasi manusia mereka.

Pernyataan diatas adalah bentuk dukungan kuat dari masyarakat Papua itu sendiri dalam Penentuan Pendapat Rakyat (PAPERA) melalui paying Hukum Internasional.

## 2. International Lawyers for West Papua (ILWP) in London

Peristiwa Peluncuran Pengacara Internasional untuk Papua Barat Bagian London dilaksanakan pada hari Rabu, 12 Oktober 2011, Jam: 6.30-20:30,

---

<sup>39</sup> Ibid

Tempat: Finers Stephens Innocent LLP, 179 Portland Street, London, W1W 5LS.

Pengacara Internasional untuk Papua Barat (ILWP) adalah jaringan internasional dari pengacara yang telah dibentuk untuk meningkatkan kesadaran tentang Papua Barat dan untuk menyajikan kasus hukum bahwa Papua Barat memiliki hak untuk menentukan Nasib Sendiri di bawah Hukum Internasional.

Pembicara pada acara Peluncuran ILWP bagian London, Inggris adalah :<sup>40</sup>

- Host: Jennifer Robinson, anggota ILWP dan pengacara Hak Asasi Manusia
- Benny Wenda, Pemimpin kemerdekaan Papua Barat di pengasingan
- Geoffrey Robertson QC, Ahli fikih PBB yang terhormat, Mantan Hakim Banding di Pengadilan Sierra Leone PBB dan Pengacara Hak Asasi Manusia
- Mark Stephens, pengacara hak asasi manusia terkemuka
- John Saltford, Sejarawan dan ahli tentang Act of Free Choice 1969 dan keterlibatan PBB di Papua Barat.

Terbentuknya IPWP dan ILWP merupakan langkah awal Benny Wenda dalam memperoleh dukungan Politik. Setelah pembukaan kantor Perwakilan OPM di Inggris, dukungan moral masyarakat Internasional hadir dalam berbagai macam kelompok dan individu, diantaranya: Pemerintah Negara,

---

<sup>40</sup> KNPB Mimika Region, 2011, *Acara Peluncuran International Lawyers for West Papua [ILWP] atau Pengacara Internasional untuk Papua Barat di London*, Diakses dari : <http://knpbtimikaregion.wordpress.com/2011/10/08/acara-peluncuran-international-lawyers-for-west-papua-ilwp-atau-pengacara-internasional-untuk-papua-barat-di-london/>

aktivis perdamaian, lembaga HAM, maupun dukungan pejabat Negara dan media internasional.

Berdasarkan berita website resmi [freewestpapua.org](http://freewestpapua.org), maka adapun dukungan internasional yang diberikan kepada OPM, yaitu :

#### 1. Dukungan Oleh Pemimpin Gerakan Anti-Anti -Apartheid

Pada tanggal 22 Juni 2013, Pemimpin anti -apartheid mendedikasikan penghargaan kepada orang-orang Papua Barat. Rev James Lawson, pemimpin hak-hak sipil yang bekerja bersama Martin Luther King, memberikan penghargaan kepada empat penentang sipil. Para penerima penghargaan adalah pemimpin gerakan untuk perlindungan lingkungan, membela masyarakat adat, hak politik, dan penindasan rasial. Salah satu pemenang tahun ini adalah Mkuseli ( Khusta ) Jack, ahli strategi yang memimpin boikot konsumen di Afrika Selatan selama hari-hari paling gelap dari apartheid. Dalam pidato penerima penghargaannya, Khusta mengatakan" Saya mendedikasikan penghargaan ini, yang bersarang dalam hati saya, bagi rakyat Papua Barat. "Orang-orang sepanjang dunia harus mengubah pandangan mereka terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di Papua Barat " kata Khusta. " Mereka harus mendengar tangisan rakyat Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri. Rev Lawson, juga memiliki beberapa saran untuk Papua Barat. Kunci untuk setiap keberhasilan perjuangan perlawanan sipil adalah disiplin sengit, perencanaan yang tepat dan strategis.

*Ethnic kin* (kerabat sesama etnis) dan diapora merupakan aliansi etnis yang berpengaruh kuat pada proses internasionalisasi konflik etnis. Saudara sesama etnis adalah sumber dukungan utama bagi sekelompok etnis yang sedang bertikai. Terdapat kecenderungan keberpihakan dari sebuah kelompok etnis kepada kelompok etnis lain yang terdepresi pada sebuah wilayah di luar wilayah yang dihuni oleh etnis simpatisan tersebut. Dukungan yang diberikan berdasarkan faktor genetik oleh *blood brothers* berdampak signifikan bagi etnis yang sedang menghadapi pertikaian, baik dengan negara (konflik vertikal) maupun dengan kelompok etnis lain (konflik horizontal).

## 2. Perdana Menteri Kepulauan Solomon

Pada 27 April 2013, Perdana Menteri Solomon Islands telah menjanjikan dukungannya terhadap agenda Papua Barat yang akan dibahas pada KTT Melanesian Spearhead Group pada bulan Juni. Dukungan-Nya datang setelah pertemuan dengan pejabat dari Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan di Honiara. KTT MSG akan diselenggarakan oleh Kaledonia Baru Kanak dan Sosialis Front Pembebasan Nasional, FLNKS tersebut. Dr Ondawame mengatakan mengingat pentingnya peran MSG bermain di politik regional sangat penting masalah Papua Barat dibahas oleh para pemimpin Melanesia.

## 3. Perdana Menteri Republik Vanuatu

Pada tanggal 29 September 2013, Perdana Menteri Republik Vanuatu, Moana Kalosil Karkas yang sepenuhnya mendukung kemerdekaan bagi Papua

Barat dan yang juga anggota pendiri International Parliamentarians for West Papua ( IPWP ), mengancam Indonesia dan PBB dari Podium PBB, untuk genosida dan sistematis mengabaikan rakyat Papua Barat sejak 1963. Bentuk pernyataan dukungannya itu disampaikannya di sela-sela membahas isu tentang keadaan di Suriah. Pidato yang mengenai Papua Barat berdurasi panjang dari 06:40 sampai 10:30 menit di podium PBB.

#### 4. Senator Australia, John Madigan

Pada tanggal 6 Oktober 2013, Senator John Madigan berbicara dalam mendukung Papua Barat. Masalah Papua Barat terus bangkit agenda di Australia. Baru-baru ini, Freedom Flotilla yang berlayar dari Australia ke pantai Papua Barat menarik perhatian media ketika tiga aktivis naik ke konsulat Australia di Bali mencari perlindungan. Senator John Madigan berbicara dengan mengatakan : sudah saatnya pemerintah kita memiliki keberanian untuk berdiri untuk Indonesia, bukannya mengabaikan masalah penindasan di Papua Barat dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di sana setiap hari.

Dukungan yang diterima OPM sebagian besar datang dari pejabat, politisi maupun lembaga advokasi. Dukungan yang disampaikan berupa pernyataan dan pembelaan yang dilakukan politisi terhadap kondisi Papua. Keprihatinan yang dirasakan oleh pendukung, menyebabkan isu-isu Papua di bahas dalam dewan PBB. Bentuk perjuangan dukungan berupa pembelaan yang dilakukan politisi adalah salah satu cara yang digunakan dalam membahas konflik Papua.

Benny Wenda telah berhasil membentuk dukungan Internasional dalam menghadapi kemungkinan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Dukungan tersebut merupakan kekuatan OPM dalam menuntut kepastian hukum terhadap nasib rakyat Papua. Kekuatan yang dimiliki OPM saat ini terletak bukan pada memanfaatkan kekuatan militer, melainkan melalui pendekatan soft power. Komunikasi politik yang dilancarkan berbuah positif, namun usaha OPM dalam memperjuangkan kemerdekaan bukanlah jaminan bahwa kelak akan berhasil maupun sebaliknya.

Tentunya, pemerintah Indonesia tidak hanya tinggal diam, saat ini posisi Indonesia tepat pada tahap pemantauan yang dilakukan Badan Intelijen Negara (BIN). Jika OPM tetap bersikeras berupaya melepaskan diri dari NKRI. Pengakuan terhadap kedaulatan NKRI pun sudah sangat jelas pada lingkup Internasional. Ini merupakan babak baru bagi OPM khususnya dalam upaya Internasionalisasi Konflik separatis Papua.